

**DETERMINAN KEMISKINAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA TAHUN 2012-2019**

***DETERMINANTS OF POVERTY IN THE PROVINCE OF THE SPECIAL  
REGION OF YOGYAKARTA, 2012-2019***

**Rifki Khoirudin<sup>1</sup>, Muhammad Safar Nasir<sup>2</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta<sup>1,2</sup>

[rifki.khoirudin@ep.uad.ac.id](mailto:rifki.khoirudin@ep.uad.ac.id)<sup>1</sup>

**ABSTRACT**

*Until now, poverty in Indonesia is still a homework that has not been completely resolved. Thus, it is necessary to analyze the factors in influencing poverty. This study aims to analyze the population, inflation rate, economic growth, and the open unemployment rate on the poverty rate in D.I. Yogyakarta Province in the 2012-2019 time period. The type of secondary data used was obtained from the D.I. Provincial Central Statistics Agency. Yogyakarta, which consists of a cross section in 5 regencies/cities in the Province of D.I. Yogyakarta and time series from 2012-2019. The analytical tool used in estimating the regression model is the Fixed Effect Model (FEM). The results showed that simultaneously all independent variables had a significant effect on the poverty level. Partially, the variables of population and economic growth have a negative and significant effect on the level of poverty in the Province of D.I. Yogyakarta. Meanwhile, the inflation rate and the open unemployment rate have no effect on the poverty level.*

**Keywords:** *poverty, population, economic growth, fixed effect model*

**ABSTRAK**

Hingga saat ini, kemiskinan di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang belum dapat teratasi secara tuntas. Dengan demikian, diperlukannya analisis untuk mengetahui faktor dalam mempengaruhi kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jumlah penduduk, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi D.I. Yogyakarta pada periode waktu 2012-2019. Jenis data sekunder yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta, yang terdiri dari *cross section* di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta dan *time series* dari tahun 2012-2019. Alat analisis yang digunakan dalam mengestimasi model regresi adalah *Fixed Effect Model (FEM)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara parsial, variabel jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi D.I. Yogyakarta. Sedangkan variabel tingkat inflasi dan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

**Kata Kunci:** *kemiskinan, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, fixed effect model*

**PENDAHULUAN**

Kemiskinan masih menjadi permasalahan besar di beberapa negara dunia. Permasalahan kemiskinan

merupakan masalah yang tidak pernah terselesaikan, yang melibatkan berbagai aspek kehidupan (Suliswanto, 2010). Kemiskinan dapat mendorong turunnya

tingkat pendapatan masyarakat, sehingga dapat memicu timbulnya masalah sosial lain seperti tingkat kejahatan, rendahnya tingkat pendidikan, serta kualitas kesehatan yang menurun.

Menurut Kuncoro (2000) permasalahan kemiskinan akan menimbulkan sebuah fenomena *vicious circle* (lingkaran setan) yang berakibat pada pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan rendah, sumber daya alam terbatas, lapangan pekerjaan dan modal menurun, serta meningkatnya beban keluarga. Padahal menurut Jonaidi dkk (2012), Putera dan Handayani (2018) kemiskinan sebagai indikator dalam menggambarkan kinerja pembangunan dari suatu negara. Sebab, tingkat kemiskinan dapat ditekan melalui pertumbuhan ekonomi yang optimal.

Menurut Made dkk (2016) pembangunan merupakan upaya secara terus menerus dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, dan memiliki daya saing. Pertumbuhan ekonomi harus terus didorong dan tingkat kemiskinan harus menurun, agar kesenjangan dan penduduk menganggur berkurang dengan adanya pembangunan ekonomi (Todaro, 2000). Oleh karena itu, penurunan angka kemiskinan merupakan fundamental penting dalam mengukur efektivitas dari program pembangunan di suatu negara.

Pembangunan nasional dan syarat pembangunan nasional harus memajukan kesejahteraan masyarakat berdasarkan undang-undang. Menurut Kesejahteraan umum menurut Badan Pusat Statistik (2016) merupakan kebutuhan penduduk negara yang sudah terpenuhi baik materil, spiritual, dan sosial sehingga ia dapat hidup dengan layak dan menjalankan fungsi sosial-ekonominya dengan baik sebagai bagian dari masyarakat. Angka kemiskinan yang rendah menunjukkan telah

tercapainya kesejahteraan umum. Proses pembangunan nasional belum dapat memberikan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat jika kemiskinannya masih tinggi (Putera dan Handayani, 2018).

Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan masalah kemiskinan sebagai prioritas utama dalam proses pembangunan ekonominya. Terdapat berbagai macam objek wisata, sekolah, perguruan tinggi, dan kuliner sebagai daya tarik dari D.I. Yogyakarta. Selain itu, perekonomian di D.I. Yogyakarta juga sedang berkembang masif. Hal ini tergambarkan dengan mulai bermunculan gedung dan bangunan tinggi yang dibangun.

Namun, hingga saat ini tingkat kesejahteraan masyarakat di D.I. Yogyakarta belum merata. Beberapa masyarakat masih ada yang tinggal di pinggir jalan dan hidup di lingkungan kumuh. Padahal, menurut hasil survei Badan Pusat Statistik (2017) indeks kebahagiaan di Provinsi D.I. Yogyakarta tergolong cukup tinggi, mencapai 72.97 persen dari skala 100 persen. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan tetap merasakan kebahagiaan.

Menurut *World Bank* kemiskinan merupakan keadaan seseorang yang memiliki keterbatasan dalam pilihan dan kesempatan. Masyarakat dikategorikan sebagai penduduk miskin berdasarkan pada kemampuan dari pendapatannya dalam memenuhi standar hidupnya. Kemiskinan dapat terjadi ketika besarnya pengeluaran seseorang berada dibawah garis batas kemiskinan. Setiap negara memiliki indikator tersendiri dalam mengukur garis kemiskinannya. Sehingga, hingga saat ini belum diberlakukannya standar garis kemiskinan secara umum.

Menurut Dama (2016) kemiskinan dibedakan kedalam empat

bentuk yaitu pertama, kemiskinan absolut yang terjadi ketika pendapatan penduduk atau sebagian penduduk berada di bawah garis kemiskinan, sehingga kebutuhan dasar hidupnya belum dapat terpenuhi. Kedua, kemiskinan relatif yang terjadi ketika proses pembangunan yang belum merata sehingga terjadi ketimpangan standar kesejahteraan dan pendapatan antar daerah.

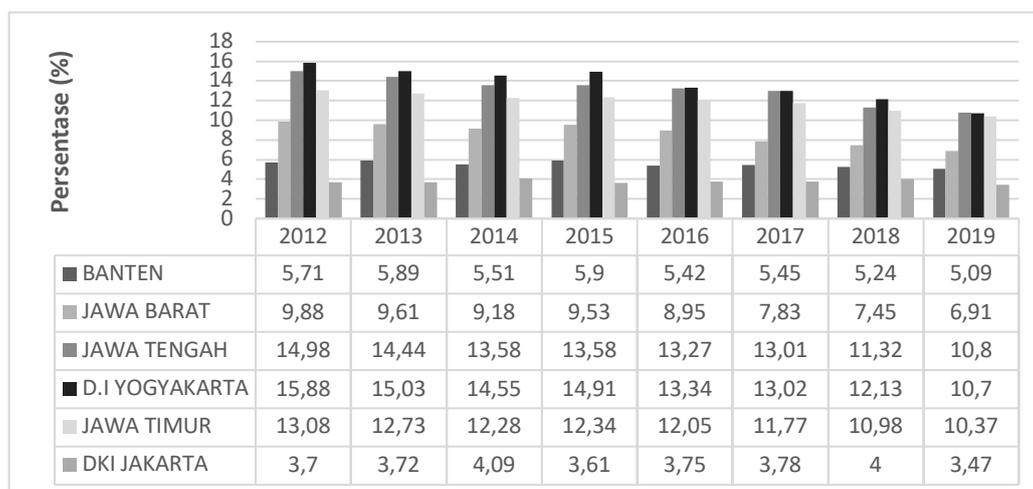
Ketiga, kemiskinan kultural yang terjadi ketika kekuatan adat masyarakat setempat sangat kuat, sehingga sulit untuk diperbaiki seperti sikap malas, boros, dan bergantung kepada orang lain. Keempat, kemiskinan struktural yang terjadi ketika rendahnya akses terhadap sumber daya, sehingga kecenderungan untuk munculnya unsur diskriminasi.

Jenis kemiskinan dapat terjadi secara alamiah karena terbatasnya sumber daya dan sarana yang tersedia, biasanya kemiskinan jenis ini dialami oleh penduduk yang berada di daerah tertinggal dan terpencil. Selain itu, jenis kemiskinan juga dapat terjadi karena efek dari pembangunan yang dikenal dengan kemiskinan buatan. Kemiskinan buatan biasanya terjadi karena target pembangunan yang terlalu tinggi di negara berkembang sehingga

menyebabkan hasil dari pembangunan yang tidak merata. Sehingga, masyarakat yang hidupnya masih bergantung pada pertanian terpaksa harus menyesuaikan diri dengan proses pembangunan.

Kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang pertama, kemiskinan yang disebabkan oleh karakter yang ada dalam diri seseorang dan terjadi secara terus menerus (*Individual Explanation Factor*) seperti malas dan belum siap memiliki anak. Kedua, kemiskinan yang disebabkan karena ketergantungan antar generasi di dalam keluarga (*Familial Explanation Factor*). Ketiga, kemiskinan yang disebabkan karena kondisi moral yang dipengaruhi oleh karakteristik lingkungan masyarakat (*Subcultural Explanation Factor*). Keempat, kemiskinan yang disebabkan oleh produk dari masyarakat (*Structural Explanation Factor*) sehingga menimbulkan perbedaan hak dan status.

Ukuran kemiskinan di Indonesia yang digunakan oleh BPS berdasarkan pada besaran pengeluaran setiap bulan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu, BPS juga membedakan kemiskinan berdasarkan daerah tempat tinggal antara wilayah perkotaan dengan pedesaan.



**Gambar 1. Tingkat Kemiskinan Di Pulau Jawa (Persen)**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020. (diolah)

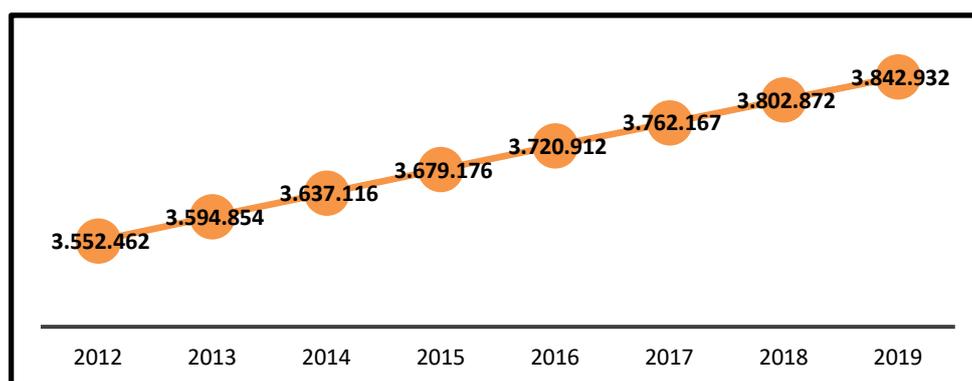
Gambar 1 memperlihatkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi D.I. Yogyakarta jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa yang merupakan pulau pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara konsisten menjadi yang tertinggi, kecuali di tahun 2019. Meskipun cenderung menurun, tetapi tingkat kemiskinan pada tahun 2015 sedikit mengalami peningkatan menjadi 14,91 persen dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukannya sebuah penelitian untuk mengidentifikasi penyebab dari kemiskinan di Provinsi D.I. Yogyakarta.

Penduduk menurut Badan Pusat Statistik didefinisikan sebagai orang yang tinggal dan memiliki tujuan untuk menetap di Indonesia selama lebih dari enam bulan. Jumlah penduduk dapat bertambah atau berkurang secara dinamis dipengaruhi oleh komponen kependudukan.

Komponen pertumbuhan penduduk disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, emigrasi, dan imigrasi. Selisih antara kematian dan kelahiran disebut sebagai pertumbuhan penduduk alamiah. Sedangkan selisih antara emigrasi dan imigrasi disebut sebagai pertumbuhan penduduk neto.

Menurut Arsyad (2010) berdasarkan pada perhitungan deret waktu, dalam kurun waktu 30 sampai 40 tahun penduduk suatu negara akan menjadi dua kali lipat. Jika tingkat pertumbuhan penduduk tidak berimbang dengan tingkat pertumbuhan persediaan pangan, maka alat pemuas kebutuhan masyarakat akan berkurang.

Dalam periode enam tahun terakhir, dari tahun 2012 sampai 2019 jumlah penduduk di Provinsi D.I. Yogyakarta terus meningkat ditunjukkan pada Gambar 2.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020. (diolah)

### Gambar 2. Jumlah Penduduk D.I. Yogyakarta (Jawa)

Laju pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi sebenarnya dapat menghambat tujuan pembangunan di daerah karena pertama, akan meningkatkan kebutuhan akan pangan, pendapatan per kapita menjadi rendah, serta kualitas sumber daya manusia yang menurun. Kedua, keseimbangan antara sumber daya alam dan jumlah penduduk

yang terlalu tinggi akan terancam, terutama bagi negara yang penduduknya masih bergantung dengan sektor pertanian.

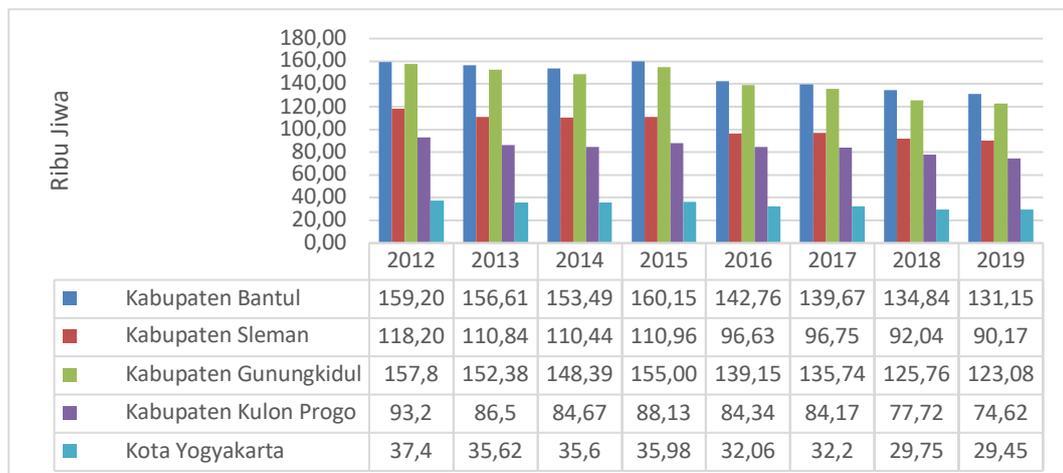
Ketiga, perubahan sosial dan ekonomi akan semakin sulit dilakukan jika semakin banyak jumlah penduduknya. Tingginya tingkat kelahiran dapat mendorong percepatan

pertumbuhan kota-kota. Tumbuhnya wilayah perkotaan baru, terutama di negara berkembang akan menimbulkan permasalahan baru sebagai akibat dari cara warga kota dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Menurut Kuncoro (1997) laju pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi dapat mengganggu perkembangan cadangan devisa serta sumber daya manusia. Pendapatan per kapita masyarakat akan terus menurun sehingga menyebabkan pada timbulnya permasalahan kemiskinan.

Pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa kesenjangan jumlah penduduk

miskin antar daerah kabupaten dan kota sangat terlihat kontras. Daerah Kabupaten Bantul sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Tahun 2015 menjadi tahun dengan jumlah penduduk miskin tertinggi yang terjadi di Kabupaten Bantul dengan jumlah 160.150 ribu jiwa sepanjang periode 2012 sampai 2019. Pembangunan yang terjadi di kawasan kabupaten terutama di Kabupaten Bantul belum berjalan secara optimal. Sehingga diperlukannya program strategis daerah yang dapat menekan jumlah penduduk miskin.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 (diolah)

### Gambar 3. Jumlah Penduduk Miskin D.I.Yogyakarta (Ribu Jiwa)

Pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak terkendali menurut Sukirno (2006) berakibat pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga upaya untuk menekan jumlah penduduk miskin sulit tercapai. Pada dasarnya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi saling berhubungan. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi dihasilkan oleh penduduk. Perolehan pendapatan penduduk di suatu daerah tertentu dapat dijadikan sebagai indikator dari

pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Sehingga, dengan tingginya jumlah penduduk seharusnya mampu untuk menggerakkan kegiatan perekonomian di daerah. Dengan demikian hubungan antara jumlah penduduk dengan tingkat kemiskinan yaitu positif.

Inflasi dapat menyebabkan harga di dalam negeri akan lebih tinggi karena kondisi harga barang dan jasa yang secara umum terus mengalami kenaikan. Kondisi ini dapat berpengaruh pada naik

dan turunnya dari nilai mata uang. Selain itu, inflasi dapat mendorong akan permintaan barang impor. Hal ini dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian di suatu negara.

Menurut Sukirno (2012) inflasi dibagi menjadi empat berdasarkan pada tingkat keparahannya. Pertama, inflasi ringan yang terjadi dengan tingkat keparahan dibawah 10 persen dengan persentase kenaikan harga yang relatif kecil. Kedua, Inflasi sedang dengan tingkat keparahan 10 sampai 30 persen yang terjadi karena persentase kenaikan harga yang cepat.

Ketiga, inflasi berat dengan tingkat keparahan 30 sampai 100 persen yang terjadi karena persentase kenaikan harga yang sangat cepat dalam waktu singkat. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian di pasar. Contohnya ketika harga minggu atau bulan ini mengalami peningkatan yang besar jika dibandingkan harga pada minggu atau bulan lalu. Keempat, hiperinflasi yang terjadi karena tingkat inflasi lebih dari 100 persen. Hiperinflasi merupakan tingkat inflasi yang paling parah dan paling merugikan bagi perekonomian.

Berdasarkan penyebabnya, inflasi dibagi menjadi dua. *Demand Pull Inflation* terjadi karena tingkat permintaan terlalu tinggi sehingga tingkat harga menjadi berubah. Menurut Sukirno (2010) hal ini karena meningkatnya jumlah permintaan barang dan jasa akan mendorong peningkatan harga. Sedangkan *Cost Pull Inflation* disebabkan karena biaya produksi barang dan jasa meningkat.

Hubungan antara inflasi dengan tingkat kemiskinan yaitu positif. Inflasi dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan karena tingkat inflasi yang tinggi, akan menimbulkan permasalahan dalam ekonomi yaitu meningkatnya jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu,

diperlukan tindakan pengendalian terhadap tingkat inflasi agar perekonomian tetap stabil dan jumlah penduduk miskin dapat ditekan.

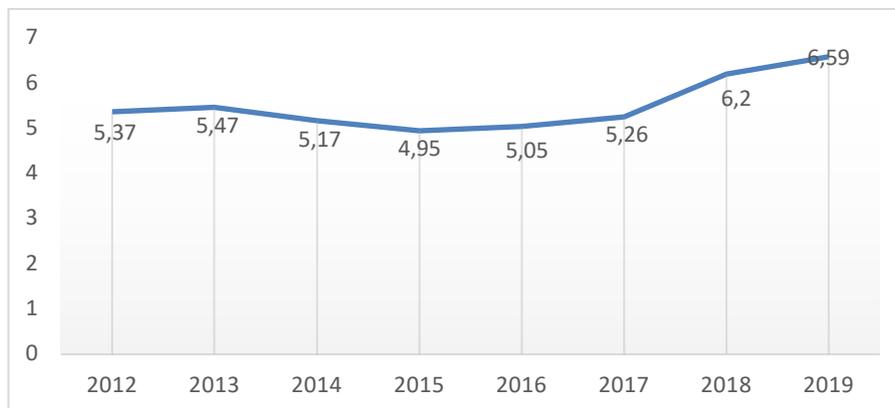
Pertumbuhan ekonomi merupakan parameter dalam mengukur kinerja pembangunan suatu negara. Menurut Fitriani (2018) pertumbuhan ekonomi di daerah tercermin pada tingkat perubahan PDRB. Tingginya PDRB suatu daerah mencerminkan bahwa banyak masyarakat di daerah tersebut yang makmur, sehingga tingkat kemiskinannya rendah.

PDRB Sasana (2006) merupakan nilai bersih dari total setiap barang beserta jasa yang diproduksi dalam kurun waktu satu periode pada suatu daerah. Perhitungan PDRB dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan pertama, pendekatan produksi yang menghitung berdasarkan nilai bersih dari total setiap barang beserta jasa yang diproduksi.

Kedua, pendekatan pengeluaran yang berdasarkan total pengeluaran dari semua pelaku ekonomi dalam kurun waktu satu periode. Ketiga, pendekatan pendapatan yang menghitung berdasarkan total pendapatan yang diperoleh (upah, gaji, sewa, dan bunga) yang memberikan sumbangan terhadap produsen. PDRB harga konstan sering digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi di setiap periodenya (Sukirno, 2012). Sedangkan, PDRB harga berlaku menurut Badan Pusat Statistik digunakan untuk mengukur besarnya struktur perekonomian beserta perannya.

PDRB yang terus meningkat menunjukkan bahwa telah terjadinya laju pertumbuhan ekonomi. Daerah dengan PDRB yang tinggi menunjukkan sebuah potensi yang tinggi pula, terutama bagi sumber penerimaan daerah tersebut. Perkembangan laju

PDRB di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2012 sampai 2019 dapat dijelaskan pada Gambar 4.



**Gambar 4. Laju Pertumbuhan PDRB D.I.Yogyakarta (Persen)**  
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020. (diolah)

Secara umum, laju perekonomian di D.I. Yogyakarta cenderung berfluktuatif, mengalami kenaikan di tahun 2013, kemudian di tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan, hingga akhirnya pada tahun 2016 sampai 2019 terus mengalami kenaikan menjadi sebesar 6,59 persen. Dengan demikian hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan yaitu negatif.

Pengangguran merupakan seseorang yang sama sekali tidak sedang bekerja yang biasanya disebabkan oleh jumlah angkatan kerja dengan lowongan pekerjaan tidak sebanding. Pengangguran dapat mengakibatkan permasalahan kemiskinan di suatu negara. Dengan tingginya pengangguran akan semakin banyak orang yang tidak memiliki penghasilan.

Menurut Telasari (2018) pengangguran terbagi kedalam empat jenis. Pertama, pengangguran friksional yang terjadi karena keputusan seseorang beralih pekerjaan sehingga dalam kurun waktu tertentu menganggur. Kedua, pengangguran struktural yang terjadi

karena ada perubahan dalam struktur perekonomian. Ketiga, pengangguran siklis yang terjadi karena kegiatan ekonomi yang merosot. Keempat, pengangguran alamiah yang terjadi karena sudah tidak tersedianya lagi kesempatan kerja.

Tingkat pengangguran yang terus menurun menurut Pradana (2016) akan berdampak pada tingkat kemiskinan yang menurun. Salah satu mekanisme pokok berupa perluasan kesempatan kerja dengan upah yang memadai bagi kelompok miskin disinyalir dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan tidak meratanya pendapatan (Arsyad, 2010). Oleh karena itu, diperlukannya upaya untuk tetap memperhatikan tingkat pertumbuhan kesempatan kerja, agar masyarakat yang menganggur dapat ditekan.

Tingkat pengangguran terbuka di D.I. Yogyakarta cenderung berfluktuatif. Hal ini disebabkan karena belum seimbang antara peningkatan jumlah kesempatan lapangan kerja dengan penambahan jumlah angkatan kerja di setiap tahunnya. Jika ketidakseimbangan

ini terus berlanjut, maka berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran sehingga jumlah penduduk miskin akan terus bertambah. Dengan demikian hubungan antara pengangguran dengan tingkat kemiskinan yaitu positif.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dalam mengetahui faktor yang mempengaruhi kemiskinan beserta pengaruh dari setiap variabel independen yang digunakan di Provinsi D.I. Yogyakarta.

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah:

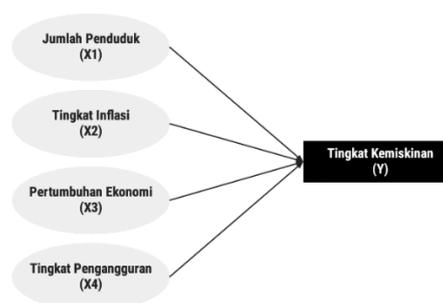
1. Susanti (2013) meneliti tentang PDRB, pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat menggunakan data panel dengan alat analisis *Ordinary Least Square* (OLS) dengan hasil semua variabel independen yang digunakan berpengaruh.
2. Wahyuningsih dan Zamzami (2014) melakukan penelitian terhadap pengaruh PDRB dan jumlah penduduk dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya menggunakan alat analisis regresi linier berganda dengan hasil semua variabel independen berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.
3. Wirawan dan Arka (2015) meneliti tentang pengaruh pendidikan, PDRB per kapita, dan tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali periode 2007-2013 menggunakan alat analisis regresi linier berganda dengan hasil tingkat pengangguran berpengaruh positif serta pendidikan dan PDRB per kapita berpengaruh negatif.
4. Made dkk. (2016) meneliti tentang pengaruh PDRB dan tingkat

pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Buleleng periode 2009-2013 menggunakan alat analisis jalur (*path analysis*) dengan hasil PDRB berpengaruh negatif dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif.

5. Dama (2016) meneliti tentang pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado Tahun 2005-2014 menggunakan alat analisis regresi linier sederhana dengan hasil PDRB berpengaruh negatif.

Sehingga penelitian ini akan membuktikan hipotesis dari:

1. Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.
2. Tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.
3. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.
4. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.



**Gambar 5.**  
**Kerangka Pemikiran**

## METODE PENELITIAN

Data yang digunakan merupakan data sekunder, diperoleh dari hasil publikasi Badan Pusat Statistik. Variabel dependen yang digunakan adalah tingkat kemiskinan (Y) di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2012 hingga 2019 dengan variabel independen jumlah

penduduk (X1), variabel tingkat inflasi (X2), variabel pertumbuhan ekonomi (X3), dan variabel tingkat pengangguran (X4). Jenis data yang digunakan data panel yang merupakan gabungan antara data *time series* tahun 2012-2019 dengan data *cross section* yaitu 5 kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta.

Pemilihan model terbaik dilakukan berdasarkan hasil dari serangkaian pengujian berupa uji *Chow*, uji *Hausman*, uji *Lagrange Multiple* dengan disertai uji apriori, uji koefisien secara menyeluruh (uji F), uji t, dan uji koefisien determinan ( $R^2$ ) dalam memilih *common effect model (CEM)*, *fixed effect model (FEM)*, atau *random effect model (REM)*.

Model data *cross section* dapat ditulis dengan persamaan:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \epsilon_i; i = 1, 2, \dots, n$$

Keterangan:

$\beta_0$  = konstanta

$\beta_1$  = koefisien regresi

$\epsilon_i$  = variabel gangguan (*error*)

n = banyaknya data

Model data *time series* dapat ditulis dengan persamaan:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \epsilon_t; t = 1, 2, \dots, t$$

Keterangan:

t = banyaknya periode waktu data

Diperoleh model persamaan regresi gabungan data *cross section* dan *time series*:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

Y : tingkat kemiskinan

$\beta_0$  : koefisien intersep

$\beta_1$  : koefisien pengaruh jumlah penduduk

$\beta_2$  : koefisien pengaruh tingkat inflasi

$\beta_3$  : koefisien pengaruh pertumbuhan ekonomi

$\beta_4$  : koefisien pengaruh tingkat pengangguran terbuka

i : kabupaten

t : waktu

$\epsilon$  : variabel pengganggu

*Common Effect/Pooled Least Square (PLS)* mengasumsikan bahwa nilai *intercept* dari setiap variabel dan *slope* koefisiennya sama. Persamaan modelnya sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 X_{3it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \mu_{it}$$

*Fixed Effect/Least Square Dummy Variables (LSDV)*

mengasumsikan bahwa terdapat perbedaan yang konstan antara objek karena setiap objek memiliki perbedaan kondisi dan waktu. Dengan persamaan modelnya sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 D_2 + \dots + \alpha_n D_n + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \mu_{it}$$

*Random Effect Model (REM)*

mengasumsikan bahwa terdapat perbedaan *intercept* dan konstanta yang disebabkan residual akibat perbedaan antara unit dan periode waktu yang terjadi secara random. Persamaan modelnya sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \epsilon_{it} + \mu_{it}$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menghapuskan kemiskinan merupakan salah satu komitmen dari pemerintah Indonesia, hal ini tercerminkan pada berbagai kebijakan yang ditujukan untuk mengentaskan

masalah kemiskinan. Pada tingkat daerah, pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta menjadikan kemiskinan sebagai fokus daerah dalam pembangunannya. Hal ini dapat tercerminkan pada target pemerintah yang ingin menurunkan tingkat kemiskinan pada tahun 2017 sampai 2022 sebesar 7-8 persen. Meskipun setiap tahunnya tingkat kemiskinan secara konsisten terus menurun. Tetapi, tingkat penurunannya tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Pada tahun 2013 angka kemiskinan turun sebesar -5,35 persen sehingga tingkat kemiskinannya menjadi 14,91 persen. Kemudian pada tahun 2016 terjadi penurunan yang sangat tajam sebesar -10,53 persen sehingga tingkat kemiskinannya menjadi 13,34 persen. Hingga akhirnya pada tahun 2019 angka kemiskinan turun sebesar -3,54 persen sehingga angka kemiskinannya menjadi 11,70 persen.



**Gambar 6. Tren Penurunan Persentase Penduduk Miskin Provinsi DIY Tahun 2012-2019**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 (diolah)

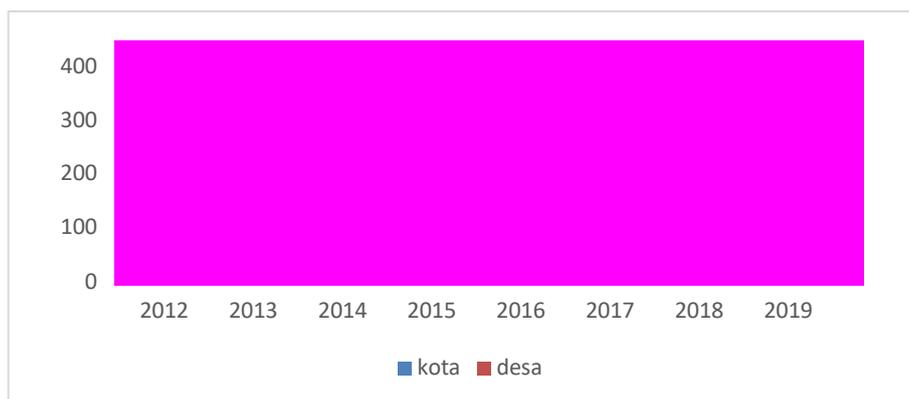
Berdasarkan persebarannya per kabupaten/kota, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo sebesar 20,19 persen, menjadi yang tertinggi di D.I. Yogyakarta. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Gunungkidul sebesar 19,57 persen dan Kabupaten Bantul sebesar 14,90 persen. Tingkat rata-rata kemiskinan dari ketiga kabupaten tersebut lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan provinsi yang hanya sebesar 13,66 persen. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sleman sebesar 8,72 persen dan Kota Yogyakarta sebesar 8,00 persen.

**Tabel 1. Persentase Rata-Rata Penduduk Miskin Per Kabupaten/Kota DIY Tahun 2012 2019**

Nama Wilayah	Rata-rata Kemiskinan (%)
Kabupaten Bantul	14,90
Kabupaten Sleman	8,72
Kabupaten Gunung Kidul	19,57
Kabupaten Kulon Progo	20,19
Kota Yogyakarta	8,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020. (diolah)

Jika ditinjau berdasarkan pada tipe wilayahnya antara tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan pedesaan sehingga tidak konsisten dengan data jumlah penduduk miskin per kabupaten/kota karena di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo didominasi oleh pedesaan.



**Gambar 7. Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah Provinsi DIY Tahun 2012-2019**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020. (diolah)

### Hasil Estimasi

Dalam analisis penelitian, perangkat lunak yang digunakan adalah *Eviews Versi 8* dengan hasil pengujian untuk menentukan model terbaik. Hasil model estimasi terdapat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Hasil Estimasi Model**

Variabel	Common	Fixed	Random
$\beta_1$	-0.000003 (0.0943)	-0.00005 (0.0000)	-3.11E-06 (0.0000)
$\beta_2$	0.5527 (0.0618)	0.0305 (0.6787)	0.5527 (0.0000)
$\beta_3$	-0.5523 (0.1174)	-0.3354 (0.0002)	-0.5525 (0.000)
$\beta_4$	-25.850 (0.0000)	-0.2351 (0.1314)	-25.850 (0.0000)
Cons	271.585	609.885	271.585
$R^2$	0.6534	0.9872	0.6534
Adjusted $R^2$	0.6138	0.9839	0.6138
F statistic	164.983	2.999.651	164.983
Prob (F-statistic)	0.0000	0.0000	0.0000

Sumber : data diolah, 2021.

### Uji Chow

Uji *Chow* digunakan untuk mengetahui model terbaik antara *fixed effect model* dengan *common effect model* dengan menggunakan dasar pengambilan keputusan berupa:

- Jika  $H_0$  diterima maka model *pool* (common).
- Jika  $H_0$  ditolak maka dilanjutkan uji Hausman.

$H_0$  diterima, maka *common effect model (CEM)* merupakan yang terbaik dan pengujian model tidak perlu dilanjutkan. Tetapi, jika hasil yang diperoleh adalah  $H_0$  ditolak, maka perlu dilakukan proses pengujian selanjutnya. Adapun hasil dari uji *Chow* tersebut sebagai berikut:

**Tabel 3. Hasil Uji Chow**

Effect Test	Probabilitas
Cross-section F	0 .0000

Sumber : data diolah, 2021.

Berdasarkan hasil tersebut kesimpulannya *fixed effect model (FEM)* sebaiknya digunakan karena diketahui probabilitas *cross section F* sebesar 0,0000 artinya  $H_0$  ditolak.

### Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk memilih model estimasi *fixed effect*

model atau *random effect model* dengan dasar pengambilan keputusan:

- Ho ditolak atau probabilitas  $< 0,05$  maka model *fixed effect* yang digunakan.
- Ho diterima atau probabilitas  $> 0,05$ , maka model *random effect* yang digunakan.

Adapun hasil dari uji *Hausman* tersebut sebagai berikut:

**Tabel 4. Hasil Uji Hausman**

Effect Test	Probabilitas
Cross-section	0 .0000
Random	

Sumber : data diolah, 2021.

Berdasarkan hasil pengujian kesimpulannya *fixed effect model (FEM)* sebaiknya digunakan karena probabilitas *Cross section random* sebesar 0,0000 sehingga pengujian untuk memilih model selesai.

### Uji Apriori

Uji apriori dilakukan dengan cara membandingkan tanda antara variabel estimasi yang digunakan dengan teori ekonomi. Pengujian hipotesis ini harus berdasarkan pada pertimbangan dari hasil penelitian terdahulu. Jika hasilnya sesuai maka model dapat dikatakan telah lolos uji apriori.

Jika tandanya positif maka variabel independen dengan variabel dependen hubungannya searah, sedangkan jika tandanya negatif maka hubungannya berlawanan. Pada Tabel 5 terdapat hasil dari uji apriori:

**Tabel 5. Hasil Uji Apriori Teoritik**

Variabel	Hipotesis	Hasil	Kesimpulan
$\beta_1$	(-/+)	(-)	Sesuai
$\beta_2$	(+)	(+)	Sesuai
$\beta_3$	(-)	(-)	Sesuai
$\beta_4$	(+)	(-)	Tidak Sesuai

Sumber : data diolah, 2021.

### Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui semua variabel independen, secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Algifari, 2013). Dalam penelitian ini tingkat kesalahan analisis ( $\alpha$ ) sebesar 5 persen dengan menggunakan formula hipotesis sebagai berikut:

Ho: Jumlah penduduk, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka, secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Ha: Jumlah penduduk, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Dasar pengambilan keputusan dari uji F sebagai berikut:

- Ho diterima dan Ha ditolak apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka hipotesis tidak terbukti.
- Ho ditolak dan Ha diterima apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka hipotesis terbukti.

Kesimpulannya adalah jumlah penduduk, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran terbuka secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan karena berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai F hitung sebesar 299,9651 dengan F tabel sebesar 0,000000.

### Uji t

Uji t menurut Ghozali (2006) digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan formula hipotesis:

- Jika nilai probabilitasnya  $> 0,05$  maka Ho diterima.
- Jika nilai probabilitasnya  $< 0,05$  maka Ho ditolak.

Adapun asumsi yang digunakan adalah jika nilai koefisien dari variabel independen negatif maka variabel independen memiliki pengaruh negatif terhadap variabel dependen dan jika nilai koefisien dari variabel independen positif maka variabel independen memiliki pengaruh positif terhadap dependen.

**Tabel 6. Hasil Uji t**

Variabel	Prob	Kesimpulan
$\beta_1$	(0.000)	Signifikan
$\beta_2$	(0.6787)	Tidak Signifikan
$\beta_3$	(0.0002)	Signifikan
$\beta_4$	(0.1314)	Tidak Signifikan

Sumber : data diolah, 2021.

Penelitian ini menggunakan taraf derajat signifikansi sebesar 5 persen sehingga berdasarkan pada hasil Tabel 3.6 persamaan regresinya:

$$KM = 60.9885 - 0.00005\beta_1 + 0.0305\beta_2 - 0.3354\beta_3 - 0.2351\beta_4$$

Keterangan:

Y = tingkat kemiskinan

$\beta_1$  = koefisien pengaruh jumlah penduduk

$\beta_2$  = koefisien pengaruh tingkat inflasi

$\beta_3$  = koefisien pengaruh pertumbuhan ekonomi

$\beta_4$  = koefisien pengaruh tingkat pengangguran terbuka

Berdasarkan hasil uji t sehingga diperoleh kesimpulan:

1. Jumlah penduduk ( $\beta_1$ ) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan yang hasilnya sejalan dengan penelitian (Wahyuningsih & Zamzami, 2014). Jumlah penduduk yang terus tumbuh merupakan faktor pendorong karena berpotensi dalam meningkatkan

jumlah tenaga kerja, sehingga menurut Sukirno (1999) jangkauan pasar akan lebih luas karena dipengaruhi jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat. Penduduk usia muda akan beranjak menjadi angkatan kerja baru sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan dalam suatu rumah tangga, bahkan memiliki kecenderungan dalam meningkatkan pendapatan per kapita. Taraf hidup yang terus meningkat mencerminkan bahwa tingkat kemiskinan yang terus menurun 32. (Cruz dan Ahmed, 2018)

2. Tingkat inflasi ( $\beta_2$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan sejalan dengan hasil penelitian Susanto dkk. (2018) dan 34. Rimate & Engka (2019) menjelaskan bahwa pada dasarnya daya beli penduduk miskin itu rendah, sehingga meskipun terjadi kenaikan inflasi pengaruhnya tidak akan terlalu signifikan. Menurut Sasana (2006) inflasi tidak berpengaruh signifikan karena masih berada pada level yang wajar, sehingga tidak terlalu menggerus daya beli masyarakat. Situasi ini akan dimanfaatkan produsen untuk meningkatkan produksinya sehingga akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran dan penduduk miskin berkurang. Tingkat inflasi di Provinsi D.I. Yogyakarta masih berada pada level yang wajar karena kurang dari 10 persen.

3. Pertumbuhan ekonomi ( $\beta_3$ ) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan hasilnya sejalan dengan penelitian (Dama, 2016). Pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada tingkat perubahan dari PDRB, sehingga PDRB merupakan cerminan langsung dari

tingkat pertumbuhan ekonomi. Menurut Adeleye dkk (2020) pertumbuhan ekonomi akan mendorong pendapatan seseorang, sehingga ia memiliki kemampuan dalam meningkatkan kapasitas konsumsinya. Oleh karena itu, diperlukannya kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tujuan untuk menekan tingkat kemiskinan (Perera dan Lee, 2013). Salah satunya dengan meningkatkan perdagangan internasional karena dapat memperluas jangkauan pasar, sehingga pendapatan masyarakat akan bertambah dan tingkat kemiskinan berkurang.

4. Tingkat pengangguran terbuka ( $\beta_4$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan yang hasilnya sejalan dengan penelitian (Rumate dan Engka, 2019). Hasil dari penelitian ini tidak sesuai dengan teori ekonomi yang ada. Pengangguran dalam penelitian ini memiliki arti bahwa seseorang memang sedang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan yang dapat dijelaskan bahwa seseorang yang sedang menganggur tidak secara otomatis menjadi miskin karena di dalam rumah tangga tersebut terdapat anggota keluarga yang memiliki penghasilan tinggi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari anggota keluarga lainnya yang sedang menganggur. Jika dilihat berdasarkan pada sisi pengangguran tersembunyi, yaitu orang yang hanya bekerja dua sampai tiga hari dalam seminggu, mereka memiliki pendapatan yang rendah. Sehingga, meskipun mereka bekerja tetapi pendapatan mereka tetap rendah, belum mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini seringkali sebagai penyebab dari

anak-anak pada penduduk miskin terpaksa harus ikut bekerja.

### **Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh setiap variabel independen, yang digunakan dalam model terhadap variabel dependen, dengan dasar pengambilan keputusan dari koefisien determinasi ditunjukkan dalam bentuk persentase (Gujarati, 2016). Nilai koefisien determinasi memiliki rentang antara 1 dengan 0. Apabila nilai  $R^2$  semakin mendekati 1, maka kemampuan dari variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat kuat dan jika nilai  $R^2$  semakin mendekati 0, maka kemampuan dari variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Kesimpulan dari penelitian adalah variabel independen yang digunakan yaitu jumlah penduduk, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran dapat menjelaskan tingkat kemiskinan di Provinsi D.I. Yogyakarta karena nilai  $R^2$  sebesar 0,9872 atau 98,72% dan sebesar 1,73% dijelaskan oleh variabel lain.

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka kesimpulannya adalah (1) jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan sehingga tingkat kemiskinan akan menurun dengan bertambahnya jumlah penduduk. Artinya bahwa, dengan adanya bonus demografi saat ini, produktivitas masyarakat akan meningkat dan taraf hidup mereka juga meningkat, sehingga mereka dapat terlepas dari jerat kemiskinan. (2) inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Tingkat inflasi yang masih berada pada level yang wajar tidak akan

menurunkan daya beli masyarakat, sehingga naiknya tingkat inflasi tidak secara otomatis langsung meningkatkan tingkat kemiskinan. (3) pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan sehingga tingkat kemiskinan akan menurun seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi, yang merupakan cerminan dari tingkat pendapatan, akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga taraf hidup masyarakat akan meningkat. (4) tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan karena meskipun seseorang sedang dalam kondisi menganggur tetapi kebutuhan hidupnya masih dapat ditopang oleh anggota keluarga yang lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adeleye, B. N., Gershon, O., Ogundipe, A., Owolabi, O., Ogunrinola, I., & Adediran, O. (2020). Comparative investigation of the growth-poverty-inequality trilemma in Sub-Saharan Africa and Latin American and Caribbean Countries. *Heliyon*, 6(12), e05631.
- Algifari, A. R. (2013). Teori, Kasus dan Solusi. *Yogyakarta: BPFE*.
- Arsyad, L. (2010). Ekonomi Pembangunan, Edisi Kelima. *Yogyakarta: UPP STIE YKPN*.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Berita Resmi Statistik D.I. Yogyakarta*. <https://www.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Berita Resmi Statistik D.I. Yogyakarta*. <https://www.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik. (2019a). *Inflasi*. <https://yogyakarta.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik. (2019b). *Kemiskinan*. <https://yogyakarta.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik. (2019c). *Kependudukan*. <https://yogyakarta.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik. (2019d). *Produk Domestik Regional Bruto*. <https://yogyakarta.bps.go.id/>
- Cruz, M., & Ahmed, S. A. (2018). On the impact of demographic change on economic growth and poverty. *World Development*, 105, 95–106.
- Dama, H. Y. (2016). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado (Tahun 2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3).
- Fitriani, F. (2018). *Analisis pengaruh tingkat investasi, belanja pemerintah, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Bulukumba*. Universitas Negeri Makassar.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2016). *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi Ketiga*.
- Jonnadi, A., Amar, S., & Aimon, H. (2012). Analisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(1).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2008). Departemen Pendidikan Nasional. *Jakarta: Pusat Bahasa*. <https://yogyakarta.bps.go.id/>
- Kuncoro, M. (1997). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Unit Penerbit Dan Percetakan PN.
- Kuncoro, M. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. *Kebijakan. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN*.
- Made, P. I., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2016). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto

- (PDRB) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 4(1).
- Perera, L. D. H., & Lee, G. H. Y. (2013). Have economic growth and institutional quality contributed to poverty and inequality reduction in Asia? *Journal of Asian Economics*, 27, 71–86.
- Pradana, K. W. (2016). Analisis pengaruh tingkat investasi, belanja pemerintah, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Bulukumba. *Skripsi*.
- Putera, R. A., & Handayani, H. R. (2018). *Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, Dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Rumate, V. A., & Engka, D. S. M. (2019). Pengaruh Tingkat Inflasi, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(3).
- Sasana, H. (2006). Analisis dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP)*, 3(Nomor 2), 146–170.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, masalah dan dasar kebijakan*.
- Sukirno, S. (2010). Teori pengantar makroekonomi edisi ketiga. *Raja Grafindo. Jakarta*.
- Sukirno, S. (2012). Makro ekonomi Teori pengantar edisi 3. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Suliswanto, M. S. W. (2010). Pengaruh produk domestik bruto (PDB) dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap angka kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 357–366.
- Susanti, S. (2013). Pengaruh produk domestik regional bruto, pengangguran dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Jawa Barat dengan menggunakan analisis data panel. *Jurnal Matematika Integratif, ISSN*, 1412–6184.
- Susanto, E., Rochaida, E., & Ulfah, Y. (2018). Pengaruh inflasi dan pendidikan terhadap pengangguran dan kemiskinan. *Inovasi*, 13(1), 19–27.
- Telasari, M. I. (2018). *Analisis Determinan Kemiskinan di Indonesia*.
- Todaro, M. P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Ketujuh*. *Jakarta: Erlangga*.
- Wahyuningsih, Y. E., & Zamzami, Z. (2014). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 1(1), 39–47.
- Wirawan, I. M. T., & Arka, S. (2015). Analisis pengaruh pendidikan, PDRB per kapita, dan tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(5), 44542.